

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoretis

2.1.1 Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik berangkat dari anggapan, bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan.

Budiardjo (2017) mendefinisikan partai politik sebagai, suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan programnya.

Carl J. Friedrich (Budiardjo, 2017), menyebut partai politik sebagai, sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil serta materiil.

Sigmund Neumann (Budiardjo, 2017), mendefinisikan partai politik sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan

pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Anthony Downs (Kartz & Crotty, 2014), mendefinisikan partai politik sebagai koalisi orang-orang yang berusaha menguasai aparat pemerintahan dengan cara-cara yang sah. John Aldrich (Kartz & Crotty, 2014), melihat partai politik sebagai koalisi elit untuk merebut dan menggunakan jabatan politik. Lebih dari itu, Aldrich berpendapat, bahwa partai politik adalah koalisi lembaga, yang telah mengadopsi aturan, norma, dan prosedur.

Melalui beberapa definisi partai politik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan suatu organisasi yang terorganisir, memiliki aturan, norma, dan prosedurnya sendiri, serta memiliki fungsi untuk merebut dan menggunakan jabatan politik melalui pemilihan umum.

2.1.2 Fungsi Partai Politik

Partai politik dapat diartikan sebagai kumpulan sekelompok orang yang memiliki orientasi yang sama, terbentuk dalam suatu wadah lembaga formal, berdasar pada ketentuan konstitusi kelembagaan dan mengikuti sistem politik dan sistem pemilihan yang ada.

Adapun tujuan dari pendirian partai politik adalah, untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu, (Surbakti, 1992).

Ketika melaksanakan fungsi itu, partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiatan. Adapun ketiga kegiatan itu meliputi seleksi

calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislative/eksekutif). Lebih dari itu, partai politik memiliki fungsi lain, yaitu:

1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Komunikasi politik diartikan sebagai proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Pada fungsi ini, partai politik berperan sebagai komunikator yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelesan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah, (Surbakti, 1992).

Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, partai politik mempunyai peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Partai politik menampung dan menggabungkan aspirasi masyarakat, mengolahnya dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Aspirasi yang sudah diolah dirumuskan menjadi usul kebijakan, yang akan dimasukkan ke dalam program atau platform partai, untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah, agar dijadikan kebijakan umum.

2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisais politk diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Sosialisasi politik juga merupakan sebuah proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan ‘budaya politik’ yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasai ke generasi berikutnya, (Budiardjo, 2017).

Sosialisasi diartikan sebagai proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses inilah, para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup, dapat diperoleh secara sengaja maupun tidak sengaja, dalam suatu pendidikan formal dan non-formal, (Surbakti, 1992).

3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik, (Surbakti, 1992). Rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik dalam pimpinan partai ataupun luar partai (legislative/eksekutif). Berdasarkan fungsi ini, maka partai memerlukan kader-kader yang berkualitas, guna memperoleh pimpinan yang berkualitas.

4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi, berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik, (Surbakti, 1992).

5. Sebagai Sarana Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik mempunyai

fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan memengaruhi proses politik, (Surbakti, 1992).

2.1.3 Tipologi Partai Politik

Surbakti (1992) membagi partai politik dalam tiga klasifikasi, yaitu asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, dan basis sosial dan tujuan.

1. Asas dan Orientasi

Pada klasifikasi ini, partai politik dipecah menjadi tiga bagian, yaitu.

- 1) Partai politik doktriner, merupakan partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkret sebagai penjabaran ideologi. Pergantian kepemimpinan mengubah gaya kepemimpinan pada tingkat tertentu tetapi tidak mengubah prinsip dan program dasar partai, karena ideologi partai sudah dirumuskan secara kongkret.
- 2) Partai politik kepentingan, merupakan partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, dan agama.
- 3) Partai politik pragmatis, didefinisikan sebagai suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Perubahan waktu, situasi, dan kepemimpinan akan memengaruhi program, kegiatan, dan penampilan partai politik.

2. Komposisi dan Fungsi

Pada klasifikasi ini, partai politik dipecah menjadi dua, yaitu.

- 1) Partai masa atau lindungan (patronage), diartikan sebagai partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu.
- 2) Partai kader, didefinisikan sebagai partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama.

3. Basis Sosial dan Tujuan

Almond (Surbakti, 1992) menggolongkan partai dalam klasifikasi ini menjadi empat, yaitu.

- 1) Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah.
- 2) Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha.
- 3) Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu.
- 4) Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu.

2.1.4 Kaderisasi Partai Politik

Kader merupakan sumber daya manusia sebagai calon anggota yang disiapkan dalam organisasi yang melakukan proses seleksi yang dilatih dan dipersiapkan untuk memiliki keterampilan dan disiplin ilmu. Proses seleksi dapat disebut juga kaderisasi.

Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah partai politik, karena ini merupakan inti dari kelanjutan perjuangan partai ke depan dan juga inti dari keberadaan partai politik. Tanpa kaderisasi kepemimpinan, rasanya sangat sulit dibayangkan sebuah partai politik dapat bergerak dan melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan dinamis. Kaderisasi kepemimpinan adalah sebuah syarat mutlak dalam membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan, (Haris, dkk, 2016).

Kaderisasi sangat penting mengingat perlu ada transfer pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam suatu kajian tertentu. Fungsi kaderisasi dalam partai politik adalah mempersiapkan calon-calon untuk siap menerima mengelola partainya ke depan. Kaderisasi juga merupakan proses untuk melatih dan mempersiapkan anggota partai dengan berbagai keterampilan, disiplin ilmu dan pengalaman untuk mencapai tujuan partai, (Haris, dkk, 2016).

Kaderisasi dalam partai politik memiliki tugas dan tujuan sebagai proses humanisasi atau pemanusiaan dengan cara transformasi nilai-nilai agar tujuan dari partai politik mampu terwujud. Pemanusiaan manusia disini dimaksudkan sebagai sebuah proses transformasi nilai-nilai yang membuat manusia (kader) mampu meningkatkan potensi yang dimilikinya.

Kaderisasi lebih bersifat sebagai proses internalisasi dari partai politik untuk meningkatkan kapasitas individual para anggotanya agar mampu menjadi fungsionaris partai baik dan dan siap menjalankan mandate yang diberikan partai untuk menduduki jabatan publik di pusat dan daerah. Kaderisasi partai juga berguna bagi regenerasi atau reproduksi kepemimpinan nasional. Oleh karena kaderisasi harus dilakukan secara professional. Kaderisasi sekaligus juga berguna untuk memastikan bahwa orang-orang yang terseleksi dalam proses rekrutmen adalah orang yang kompeten atau memiliki loyalitas terhadap partai.

Fungsi dari kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon (embrio atau regenerasi) yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Peran kaderisasi dalam organisasi sebagai berikut; (1) Pewarisan nilai-nilai organisasi yang baik; (2) Penjamin keberlangsungan organisasi; (3) Sarana belajar bagi anggota. Bisa dikatakan bahwa kaderisasi merupakan suatu proses pendewasaan.

Haris, dkk (2016), menyebutkan, bahwa partai harus menciptakan pola pembinaan kader yang terprogram, terukur, sistematis, dan komprehensif serta berlaku di semua lini kader dan wilayah kader yang mencakup:

1. Adanya tata norma, aturan dan tata institusi dalam membentuk sistem pengkaderan, baik pengkaderan umum dan pengkaderan khusus;
2. Adanya model rekrutmen yang terbuka dan demokratis;
3. Terdapatnya sistem evaluasi pembinaan kader yang berkesinambungan;

4. Model pembinaan perempuan kader partai, baik dari segi strategi pembinaan, materi pembinaan maupun metode pembinaan hendaknya dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan.

Haris, dkk (2016) menyebutkan, bahwa untuk mengetahui parpol melakukan proses kaderisasi atau tidak dapat dilihat melalui:

1. Adanya kurikulum atau silabus kaderisasi.
2. Adanya divisi yang menjadi penanggung jawab atau penyelenggara kaderisasi.
3. Adanya rentang waktu yang jelas untuk masing-masing penyelenggara kaderisasi.
4. Output dari rentang kaderisasi berupa capaian kapasitas yang disasar dari masing-masing level.

2.1.5 Rekrutmen Partai Politik

Basri (2013) mengartikan rekrutmen politik sebagai proses penempatan individu ke dalam struktur-struktur sistem politik. Proses penempatan tersebut guna mengisi kekosongan ataupun melakukan rotasi elite. Rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik, pemerintah, ataupun lembaga-lembaga lain yang memiliki otoritas politik.

Rekrutmen politik menjadi salah satu tugas dan fungsi dari partai politik. Fungsi ini menjadi amat penting, karena dari fungsi inilah yang akan menentukan kualitas wakil rakyat dan para pejabat publik yang diproduksi oleh parpol melalui pemilu.

Ramlan Surbakti mendefinisikan rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen menjadi hal yang penting, sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.

Macridis (dalam (Amal, 2012)) menyebutkan bahwa rekrutmen, dalam pengertian yang seluas mungkin, menunjuk pada latihan (*training*) dan persiapan untuk kepemimpinan: terbuka untuk masyarakat, badan legislative pemerintah atau anggota partai yang lain, dan tentu saja, untuk berkompetisi secara baik di dalam pemilihan.

Haris, dkk (2016) menyebutkan, bahwa partai politik, dalam melakukan rekrutmen secara ideal berpedoman pada sejumlah prinsip yang berlaku secara umum atau lazim dalam proses kandidasi. Minimal ada 10 prinsip yang menjadi rujukan, sebagai berikut.

1. Loyalitas, kesetiaan pada partai.

Loyalitas menjadi hal yang penting. Dengan loyalitas, politisi akan lebih memahami jati diri partai di samping semakin memperkaya pengalaman politisi itu sendiri untuk berkarir dan berkontribusi bagi keberlangsungan partai politiknya.

2. Bersih, bebas dari perilaku dan tindakan tercela.

Anggota, kader, dan pengurus partai politik merupakan politisi yang akan mewakili masyarakat, baik di lembaga legislative maupun eksekutif. Untuk

itu, perlu bagi calon anggota partai politik untuk bersih dan bebas dari perilaku dan tindakan tercela.

3. Transparan/terbuka. Meliputi mekanisme rekrutmen, profil politisi dan partai politik, serta kapasitas politisi.

4. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan.

Proses rekrutmen hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota partai juga kepada masyarakat. Setidaknya dengan proses rekrutmen yang terbuka, partai politik membuka diri dalam hal mekanisme dan calon yang diseleksi kepada masyarakat, terutama kepada konstituennya. Dengan demikian partai politik akan berupaya menghadirkan individu-individu yang berkualitas, tidak hanya yang bermanfaat untuk membesarkan partai namun juga patut menurut masyarakat.

5. Meritokrasi. Menyampingkan mekanisme rekrutmen yang didasarkan pada kedekatan personal.

Dalam hal rekrutmen partai dan pejabat publik, partai politik seharusnya menyampingkan mekanisme rekrutmen yang didasarkan atas kedekatan personal, termasuk kultur dan kekeluargaan. Idealnya, seleksi berdasarkan keahlian dan ikatan ideologi diawali dari rekrutmen anggota partai. Terlebih lagi untuk seleksi pengurus dan pejabat publik harus lebih didasarkan pada keahlian, kecakapan teknis, dan pengalaman organisasi.

6. Demokratis (*fairness* dan inklusif).

7. *Decentralized/autonomus*. Dilakukan secara proporsional tanpa ada intervensi pemimpin pusat.
8. Kecukupan pembiayaan (*financial-sufficiency*). Kemampuan calon anggota dalam memberikan dukungan, seperti iuran rutin anggota, dan biaya kampanye yang dikeluarkan dari kantong pribadi.
9. Humanis. Keterbukaan akses bagi siapa saja tanpa memperhatikan status sosial-ekonomi.
10. Non-partisan. Dalam melakukan rekrutmen, rekruter harus memperlakukan calon dengan hak yang sama.

Pada dasarnya proses rekrutmen merupakan proses seleksi kandidat yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk dicalonkan dalam kompetisi pada pemilihan umum. Pada proses rekrutmen terdapat latihan (*training*) juga pemberian ideologi.

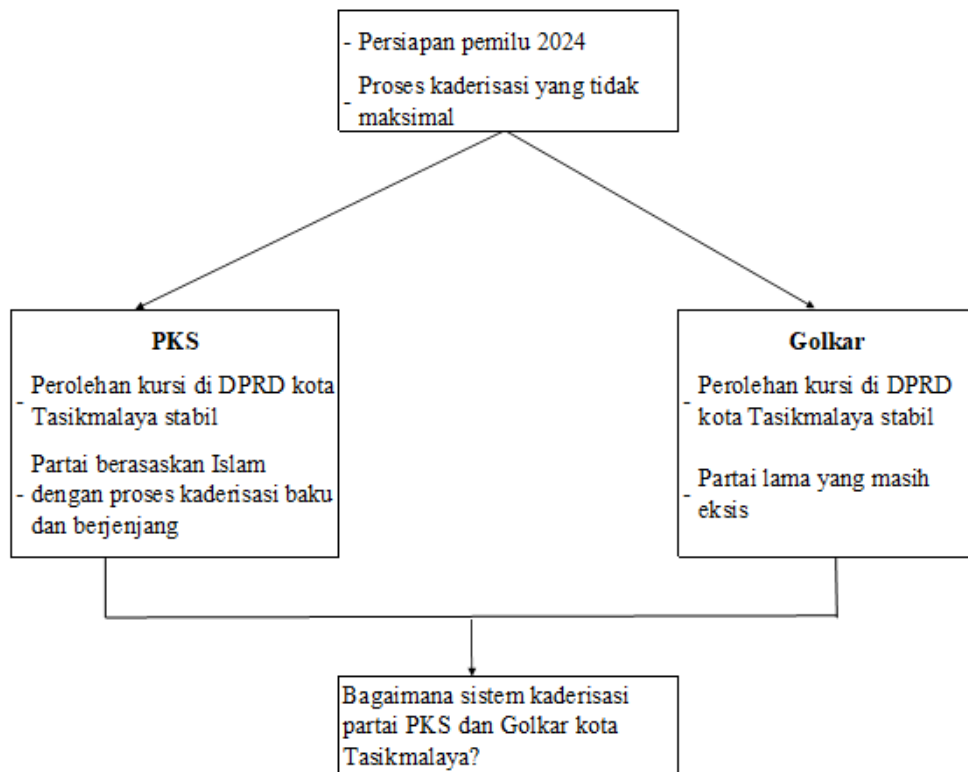
2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Ringkasan	Persamaan	Perbedaan
1	Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya terhadap Kepemimpinan Nasional. Oleh, Insan Harapan Harahap.	Jurnal ini mendeskripsikan permasalahan kaderisasi pada partai politik, dan pentingnya rekrutmen serta kaderisasi politik yang dilakukan oleh partai politik.	Membahas mengenai pentingnya kaderisasi partai politik.	Penelitian ini berfokus pada pola kaderisasi, dan proses kaderisasi politik. Bukan pada rekrutmen politik, dan permasalahan kaderisasi politik secara terperinci.
2	Pola Kaderisasi Partai Politik (Studi Deskriptif: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Dewan Pimpinan Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2021) Oleh, Vernanda Samuel.	Skripsi ini menjelaskan mengenai proses kaderisasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Dewan Pimpinan Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2021.	Memiliki kesamaan topik penelitian, yaitu pola kaderisasi partai politik.	Perbedaan objek penelitian, lokasi penelitian, dan metode yang digunakan.
3	Model Kaderisasi Partai Politik Melalui Sayap Partai. Oleh, Ridho Ferdian, Robi Cahyadi Kurniawa, R. Sigit Krisbiantoro, dan Himawan Indrajat.	Jurnal ini membahas mengenai Partai Gerindra, NasDem, dan PKS, yang menggunakan model kaderisasi yang berbeda. Partai Gerindra dan NasDem yang menggunakan model kaderisasi terbuka, dan Partai PKS	Membahas topik yang sama, yaitu model kaderisasi dalam partai PKS, meski dengan perbandingan	Perbedaan objek dan lokasi penelitian.

		yang menggunakan model kaderisasi tertutup.	partai lain yang berbeda.	
4	Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Golkar di Kabupaten Sinjai Periode 2014-2019 Oleh, M. Anas.	Penelitian ini membahas mengenai sistem rekrutmen dan kaderisasi partai Golkar secara terperinci di kabupaten Sinjai.	Membahas topik yang sama, yaitu kaderisasi partai Golkar.	Perbedaan objek dan lokasi penelitian.
5	Pendidikan Politik dalam Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tasikmalaya Oleh, Rizki Dicky Pratama.	Penelitian ini membahas mengenai pendidikan yang ada dalam sistem kaderisasi partai PKS di kota Tasikmalaya.	Membahas hal yang sama, yaitu PKS.	Perbedaan objek penelitian.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Pemilu 2024 merupakan kontestasi politik akbar yang akan dihadapi Indonesia, dimana rakyat akan memilih Capres, Caleg, dan Calon kepala daerah. Berdasarkan hal ini, maka partai politik perlu mempersiapkan kadernya supaya dapat bersaing dalam Pemilu. Persiapan ini berupa kaderisasi, supaya dapat mengusung kader yang unggul, berintegritas, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Sehingga fenomena kader yang terjerat kasus korupsi, dinasti politik, dan penjualan jabatan publik tidak lagi terjadi. Serta fenomena kader instan dan kader loncat pagar tidak terulang setiap Pemilu menjelang.

Partai PKS dan Partai Golkar merupakan partai yang unik. PKS adalah partai berasaskan Islam-kader, dengan kaderisasi baku dan berjenjang. Perolehan kursi di DPRD kota Tasikmalaya pun cukup stabil. Sedangkan Partai Golkar merupakan partai lama yang masih bertahan dan tetap eksis hingga saat ini. Perolehan kursi di DPRD pun sama stabilnya. Menandakan, bahwa kedua partai ini mampu diterima dan dikenal oleh masyarakat.

Lalu bagaimana dengan proses dan sistem kaderisasi yang dilakukan oleh kedua partai ini, sehingga mereka mampu diterima dan dikenal oleh masyarakat?